



RENCANA KERJA KECAMATAN SILAEN

**TAHUN
ANGGARAN
2025**

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Silaen merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya Rencana Kerja ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Kecamatan Silaen.

Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2025, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Silaen, Juli 2024

CAMAT SILAEN



DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SILAEN TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Silaen	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan	14
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silaen	21
2.4. Review Terhadap Renja	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	33
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SILAEN	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Silaen	35
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
3.4. Program dan Kegiatan	44
3.5. Pendanaan Kecamatan Silaen	46
BAB V. PENUTUP	47

DAFTAR LAMPIRAN

TABEL T.C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Silaen s/d Tahun 2023

TABEL T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Silaen

TABEL T-C.31 Review terhadap Rancangan Akhir Renja Tahun 2025

TABEL T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

TABEL T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Silaen Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

Kecamatan adalah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 226 Camat mendapatkan pelimpahan tugas sebagai kewenangan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan untuk melaksanakan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kantor Camat Silaen Tahun 2025 merupakan rencana tahun keempat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Silaen 2021 – 2026. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Silaen Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2025, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kantor Camat Silaen untuk pelaksanaan Kegiatan tahun 2025.

Secara umum Rencana Kerja Kecamatan Silaen Tahun 2025 memuat kebijakan dan kegiatan yang merupakan penjabaran dan implementasi serta pemberdayaan aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan dari Bupati Toba. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2025 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi

pada tahun 2025. Termasuk isu-isu strategis yang ikut mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2025 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba dengan visi TOBA UNGGUL DAN BERSINAR

RENJA Kecamatan Silaen mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

- 1 Menjadi acuan bagi Kecamatan Silaen yang memuat kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- 2 Menjadi pedoman dalam menyusun RKA yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Toba karena memuat Program dan Kegiatan Kantor Camat Silaen selama satu tahun;
- 3 Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Kecamatan Silaen sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana APBD Kabupaten Toba.

Kedudukan RENJA Kantor Camat Silaen merupakan bagian penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RENSTRA) Kecamatan Silaen Tahun 2021-2026 dan Dokumen Renja Kecamatan Silaen tahun 2025 ini dilengkapi dengan lampiran- lampiran yang antara lain berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing- masing Program yang didasarkan atas pagu indikatif.

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian, dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan Kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

Adapun acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaen adalah mengacu pada RPJPD Kabupaten Toba yang maksudnya untuk menjamin terciptanya kesinergian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan. Selanjutnya bahwa Rencana Kerja ini disusun mempedomani Tupoksi sehingga dalam pelaksanaan RENJA ini benar-benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai Aparatur Daerah/ Kabupaten. Walaupun dalam pelaksanaannya bahwa ada beberapa Program yang disusun berdasarkan isu-isu yang strategis yang perlu mendapat penanganan mendesak dan secepatnya dan juga program yang disusun berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan.

Oleh sebab itu bahwa Kecamatan Silaen tidak terlepas dan bahkan merupakan tindak lanjut pengejawantahan atau penjabaran dari Visi Misi Kabupaten Toba dalam bentuk Program dan Kegiatan yang sudah barang tentu menjadi acuan Camat Silaen sebagai Perangkat Daerah di Kecamatan untuk menjabarkan atau menindaklanjuti Visi- Misi tersebut.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Silaen dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas perencanaan kegiatan strategis di Kecamatan Silaen guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan oleh Pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka Rencana Kerja Kecamatan Silaen ini disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Silaen untuk mewujudkan dan mendukung Visi dan Misi kabupaten Toba yang dijabarkan dalam 1 (satu) tahun Anggaran
2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Silaen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Kecamatan Silaen ini bertujuan sebagai penyelaras, Panduan, Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Kecamatan Silaen yang selanjutnya dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan untuk tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RENJA Kecamatan Silaen Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Gambaran Umum penyusunan RENJA Kecamatan Silaen yang memuat Substansinya pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Renja ini dibuat.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SILAEN TAHUN LALU

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SILAEN

Bab ini memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan dari Renja Kecamatan Bonatua Lunasi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SILAEN

Bab ini memuat Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SILAEN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Silaen Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Silaen Tahun 2025 merupakan uraian kegiatan periode tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Silaen Periode tahun 2021-2026 yang tentunya dalam penyusunannya juga dipertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui dan dipertimbangkan program kerja yang memenuhi dan tidak memenuhi target, kegiatan prioritas yang perlu dilanjutkan dan menjadi evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Dalam hal ini yang perlu dievaluasi pelaksanaannya adalah perkiraan capaian periode tahun lalu, dimana akan direview hasil evaluasi antara realisasi Renstra dengan Realisasi Renja yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Program kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan antara lain:
 - a) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - b) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Toba
 - Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :
- a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 - c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 - e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Toba
 - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
 - Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Tidak ada yang Program/Kegiatan Renja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor tidak tercapainya target yang ditentukan sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun lalu adalah disebabkan antara lain pengurangan anggaran untuk tahun Anggaran tahun berjalan pada setiap Perangkat Daerah sehingga Kecamatan Silaen melaksanakan Program dan

Kegiatan yang benar-benar menjadi Skala Prioritas dan mendesak dilaksanakan.

5. Akibat dari adanya target Renja dan Renstra tidak dapat dilaksanakan, maka dapat mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga Kecamatan Silaen mensiasatinya dan mengambil kebijakan dengan melaksanakan sebagian program dan kegiatan dengan mengandalkan partisipasi dan dukungan dari stake holder dan masyarakat.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak tercapainya target yaitu diperlukan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan dan kewenangan terhadap kegiatan yang prioritas di Kecamatan.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Silaen Tahun lalu dan Pencapaian kinerja Renstra dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagai berikut:

Tabel 2.1 (Tabel TC.29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023)

Perangkat Daerah : KECAMATAN SILAEN

Kode	Unsur/Bijang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target Kinerja Capaian Program/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target program / kegiatan Renja tahun berjalan Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra berjalan Daerah s/d tahun berjalan			
					2023				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Kegiatan, Sub Kegiatan s/d dengan Tahun (n-1) Al22				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra (%)			
					Target Renja Tahun 2023				Realisasi Renja Tahun 2023				(Tahun n-1)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(6+8)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01	KECAMATAN																			
7.02.02	PROGRAM PEYELENGGARAN PENERIMAANHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyeleenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100,00	81.438.356,00	100,00	87.946.033,00	100	90.158.950,00	48,43	82.797.500,00	0,46	90,92	100,00	140.457.876,00	29,29	170.743.533,00	0,29	0,20	
7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Penerimahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Penerimaan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	35,00	687.121.866,00	3,00	59.438.288,00	4	87.713.750	3,00	80.354.800,00	0,75	0,92	7,00	140.457.676,00	6,00	139.793.068,00	0,17	0,20	
7.01.02.203	Koordinasi Pembentahan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	Persen	100,00	1%6.316.493,00	100,00	28.507.765,00	100	2.445.200	75	2.442.700,00	0,75	1,00	0,00	0,00	35,00	30.950.465,00	0,35	0,19	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASTARAKAAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyeleenggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100,00	214.605.355,00	100,00	22.341.400,00	100	23.740.100	75,00	23.525.000,00	0,75	0,99	100,00	44.663.360,00	35,00	45.866.400,00	0,35	0,21	
7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pembentahan Desa Kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	2,00	214.605.355,00	2,00	22.341.400,00	2	23.740.100	1,00	23.525.000,00	0,50	0,99	2,00	44.663.360,00	3,00	45.866.400,00	1,50	0,21	

Tabel 2.1 (Tabel TC.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023)																			
	PROGRAM	Percentase Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100,00	96.023.998,00	100,00	18.900.000,00	100	19.200.000	50,00	0,50	1,00	100,00	19.199.962,00	30,00	38.100.000,00	0,30	0,40	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengasasan Kepala Daerah yang diisamakan	Kegiatan	5,00	96.023.998,00	1,00	18.900.000,00	1	19.200.000	1,00	19.200.000,00	1,00	1.00	1,00	19.199.962,00	2,00	38.100.000,00	0,40	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusn Pemerintahan Umum sesuai Pengasasan Kepala Daerah																		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Percent Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100,00	53.125.805,00	100,00	6.450.000,00	100	10.848.000	25,00	7.725.000,00	0,25	0,71	100,00	10.371.326,00	25,00	14.175.000,00	0,25	0,27
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	Desa/Kelurahan	23,00	53.125.805,00	23,00	6.450.000,00	23	10.848.000	23,00	7.725.000,00	1,00	0,71	23,00	10.371.326,00	46,00	14.175.000,00	2,00	0,27
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	13.143.101,476	51,53	1.845.393,310	100	3.542.367,118	28,44	1.896.655.303,00	0,28	0,54	100,00	2.567.320.134,00	15,99	3.742.048.613	0,16	0,28
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100,00	50.364.951,00	0,00	0,00	100	5.038.600	100,00	5.038.600,00	1,00	1,00	100,00	10.012.883,00	20,00	5.038.600,00	0,20	0,10
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100,00	10.821.253.307,00	100,00	1.559.517.707,00	100	3.155.503.342	75,00	1.595.985.635,00	0,75	0,51	100,00	2.154.967.455,00	35,00	3.155.503.342,00	0,35	0,29
7.01.01.2.02.05	Administrasi Kepajuaran Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepjaujan	Persen	100,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100,00	62.661.066,00	69,35	82.439.663,00	100	101.841.596	75,00	90.667.300,00	0,75	0,89	100,00	111.522.806,00	28,87	173.106.963,00	0,29	0,28
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peninjaman Uraian Pemerintahan Daerah	Cakupan perlakuan dan pengelolaan pendukung kinerja aparat	Persen	100,00	37.776.663,00	100,00	34.200.000,00	100	70.640.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.278.068,00	20,00	34.200.000,00	0,20	0,09
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Peninjaman Uraian Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100,00	71.1937.335,00	100,00	104.891.930,00	100	105.840.000	75,00	104.714.630,00	0,75	0,99	100,00	137.376.662,00	35,00	209.606.560,00	0,35	0,29
7.01.01.2.09	Penelihianan Barang Milik Daerah Peninjaman Uraian Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpilihara	Persen	100,00	525.118.154,00	100,00	64.344.010,00	100	103.503.580	75,00	100.249.138,00	0,75	0,97	100,00	94.162.270,00	35,00	164.593.148,00	0,35	0,31
		TOTAL			14.370.294.993		1.981.030.743		3.686.314.168	0,45	0,83			2.782.012.458		4.010.933.546	0,27	0,27	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Silaen

Kinerja Satuan Perangkat Daerah dapat diukur dari berbagai indikator, yang tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat.

- Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir.

Camat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Camat sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada Kecamatan serta kelompok Jabatan fungsional;
 - c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan masyarakat;
 - e) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - g) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- h) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
- i) Membina dan mengawasi penyelenggraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- k) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Silaen meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

> Kekuatan

- Letak Geografis Kecamatan Silaen yang cukup strategis karena sebagian besar wilayahnya terletak di jalan lintas Provinsi
- Potensi wisata rohani Gereja dan Makam DR. IL. Nomensen sebagai tujuan wisata
- Adanya keterbukaan Informasi dan Layanan
- Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas

- Kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan yang relatif kondusif

➤ **Kelemahan**

- Keterbatasan Sumber Daya Aparatur yang belum memiliki Kompetensi
- Keterbatasan sarana dan prasarana Pelayanan Publik
- Angka kemiskinan di Wilayah Kecamatan Silaen yang masih relatif tinggi
- Kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan
- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana

2. Lingkungan Eksternal

➤ **Peluang**

- Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan publik
- Posisi/ letak Kecamatan Silaen yang strategis yang berada di jalan lintas Provinsi
- Adanya sumber-sumber potensial dari pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat
- Hubungan koordinasi dan sinergi yang baik dengan instansi vertikal
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu
- Keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa terjaga

➤ **Ancaman**

- Sarana dan Prasarana Publik yang masih rendah dan kurang memadai
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

- Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Analisa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Silaen diuraikan pada Tabel TC.30. berikut:

Tabel 2.2 (TC.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SILAEN)

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS	
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I Indikator Kinerja Utama (IKU)														
1	Percentase peningkatan tata kelola pemerintahan di Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	73,41 %	60%	100%	100%	100%	
2	Percentase layanan administrasi pemerintahan umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
II Indikator Kinerja Sasaran (IKS)														
1	Percentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas public			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%
2	Percentase Desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
3	Percentase jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%
4	Percentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	

Tabel 2.2 (TC.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SILAEN)

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKATDAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	persentase layanan administrasi yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	67,00 %	50%	60%	100%	100%	
Indikator Kinerja Program (IKP)														
1	Cakupan Penyele.ngaraan pelayanan publik di Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	87,50 %	50%	50%	100%	100%	
2	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	23%	50%	50%	100%	100%	
3	Perse.n desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	
4	Perse.n desa, tertib pemerintahan desa administrasi			100%	100%	100%	100%	100%	23%	50%	50%	100%	100%	
5	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	100%	67,05%	50%	50%	100%	100%	

Tabel 2.3 (Tabel Jenis Layanan Administrasi Umum)

No	Jenis Layanan Administrasi Umum	Sub Kegiatan	PIC
1	Memfasilitasi pelayanan ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
2	Membuat pengantar ijin usaha dagang	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
3	Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retibusi daerah di wilayah kecamatan sesuai ketentuan peraturan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
4	Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP,KK, serta surat keterangan pindah, dll	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
5	Melaksanakan pengawasan dan penyaluran Bantuan KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial, PKH)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
6	Memfasilitasi penyelesaian masalah / sengketa yang terjadi di desa	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Trantib
7	Memfasilitasi dan meneliti pemberkasan SKHM, ahli waris, IMB	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Trantib
8	Membuat laporan data kependudukan di wilayah Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Tapem
9	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kasi PMD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Silaen

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silaen dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai banyak keberhasilan dan komitmen untuk memperbaiki kinerja maupun pelayanan publik antara lain agar setiap urusan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien seperti pelayanan kependudukan, proses perizinan dan terfasilitasinya proses pembangunan, terbinanya kelompok masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kedudukan hak dan kewajibannya.

Tentu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban banyak permasalahan dan hambatan yang ditemui sehingga mempengaruhi capaian kinerja Kecamatan antara lain rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Desa, minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana desa, berkurangnya animo masyarakat akan wawasan kebangsaan maupun berkurangnya tradisi budaya gotong royong dan rendahnya rasa peduli/memiliki di tingkat masyarakat.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program, tantangan ke depan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Silaen antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah terhadap hukum dan peraturan, sikap masyarakat yang apatis dan kurang peduli akan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, dan relatif sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat pengangguran khususnya generasi muda.

Sementara peluang yang didapat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain banyaknya anak rantau asal Silaen yang telah berhasil untuk dapat diajak berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, belum tergalinya sepenuhnya potensi-potensi Kecamatan seperti prospektif pembukaan lahan-lahan tidur, potensi pariwisata, perikanan danau dan pengembangan industri rumah tangga. Disamping itu letak geografis Kecamatan Silaen yang strategis berada pada jalur perlintasan Provinsi dan terdapatnya perusahaan-perusahaan besar membuka peluang meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, diharapkan untuk mempercepat proses pembangunan di Kecamatan Silaen dengan memprioritaskan penguatan lembaga Desa, peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa seperti pengadaan Kantor Desa, penataan dan penguatan fungsi Kelurahan, dan peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat Pedesaan dalam pelaksanaan proses pembangunan.

2.4 Review terhadap Renja

Sebelum penyusunan finalisasi Rencana Kerja Kecamatan Silaen, banyak proses yang dilaksanakan sehingga rencana dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rencana Kerja yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi skala Prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja Kecamatan Silaen Tahun 2025 yang merupakan finalisasi setelah menerima masukan dan perbaikan dari berbagai pihak dan mempertimbangkan hasil Musrenbang baik Musrenbang Desa, Kecamatan maupun Musrenbang RKPD Kabupaten Toba.

Review terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel TC.31 sebagai berikut:

Tabel 2.4 (TC.31 Review terhadap Rancangan Ahir Renja Tahun 2025)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t capaia n	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaia n	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kec. Silaen	Cakupa n kinerja penunj ang urusan pemerint'a h daerah	100 Persen	4.741.345.250	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kec. Silaen	Cakupan kinerja penunjan g urusan pemerinta h daerah	100 Persen	2.469.424.602	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Silaen	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2	21.961.500	Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Silaen	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	25.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Silaen	Jumlah Dokum en	12	13.176.900	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Silaen	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2	12.500.000	en

Tabel 2.4 (TC.31 Review terhadap Rancangan Ahir Renja Tahun 2025)

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Silaen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Silaen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	12.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100 Persen	3.879.865.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100 Persen	1.918.249.000
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Silaen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1	3.879.86.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Silaen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 org/bulan	1.918.249.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen	296.480.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen	146.055.602
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Silaen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	50	65.884.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Silaen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 paket	45.555.602

Tabel 2.4 (TC.31 Review terhadap Rancangan Ahir Renja Tahun 2025)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Silaen	Jumlah paket barangcetakan dan penggandaan yang disediakan	6	16.105.100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Silaen	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	13.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan- undangan	Kec. Silaen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan yang Disediakan	3	11.712.800	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan- undangan yang Disediakan	Kec. Silaen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	7.500.000
Penyeleng garaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Silaen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230	190.333.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Silaen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	80.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	74	268.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	75	95.000.000		

Tabel 2.4 (TC.31 Review terhadap Rancangan Ahir Renja Tahun 2025)

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Silaen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	145.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Silaen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	35.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Silaen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Silaen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	55.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Silaen	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah	100 Persen	165.000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah	100 Persen	176.320.00	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Silaen Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	57.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Silaen Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	16.000.000

Tabel 2.4 (TC.31 Review terhadap Rancangan Ahir Renja Tahun 2025)

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Silaen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 60.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Silaen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	74 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100 persen 0
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kenderaan perorangan dinas atau kenderaan jabatan	Kec. Silaen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau pajak kenderaan dinas	5 62.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan	Kec. Silaen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau pajak kenderaan dinas	4 unit 65.300.000

Tabel 2.4 (TC.31 Review terhadap Rancangan Akhir Renja Tahun 2025)

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Lainnya yang Dipelihara	Kec. Silae n	45	24.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.3 unit	6.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Silae n	2	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya	Kec. Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	42.000.000
Program 2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan			100 Persen	80.525.500	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	301.824.398
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Kegiatan Tingkat kecamatan	181.824.398

Tabel 2.4 (TC.31 Review terhadap Rancangan Ahir Renja Tahun 2025)

Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan Prasarana publik dalam kondisi baik
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	0	-
Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Tabel 2.4 (TC.31 Review terhadap Rancangan Ahir Renja Tahun 2025)

3 Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	23	109.075.45 Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 persen	90.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	109.075.45 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang Dilakukan	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang Dilakukan	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang Dilakukan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23	50.511.450	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kec. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Ke Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan C. Sila en	23 laporan
					Masyarakatdi Wilayah Kecamatan	60.000.000

Tabel 2.4 (TC.31 Review terhadap Rancangan Ahir Renja Tahun 2025)

Program Penyelemparan 4 dan Urusan Pemerintahan Umum	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	1	43.923.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100	30.000.000
Penyelemparan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	1	43.923.000	Penyelemparan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	1	Kegiatan 30.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	43.923.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kec. Dokumen Silaen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	30.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	23	26.353.800	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	100	120.000.000

Tabel 2.4 (TC.31 Review terhadap Rancangan Ahir Renja Tahun 2025)

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi	23	26.353.800 dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi	Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi	23 Desa	120.000.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Silae n	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4	21.961.500 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Silae n Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	23 Desa	120.000.000
J U M L A H				3.011.249.000	J U M L A H		3.011.249.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan terlebih dahulu dilengkapi dengan data usulan dan rencana Pembangunan yang menjadi skala prioritas dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kecamatan Silaen dalam merancang program dan kegiatan pembangunan satu tahun kedepan juga mempertimbangkan proses pembangunan yang sedang berlangsung, hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan yang menampung seluruh proses aspirasi masyarakat, serta hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Silaen yang diusulkan dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berisi Program dan Kegiatan Pembangunan yang didanai baik dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun dana bantuan dari masyarakat/ *stakeholder*.

Tabel 2.5 (TC.32 Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					
J U M L A H					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan skala prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada serta kendala-kendala yang bisa terjadi dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart fungsi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan yang digariskan dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Silaen untuk masa 1 (satu) tahun ke depan dalam periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik Kecamatan
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja pemerintahan Kecamatan
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Silaen

Bertitik tolak pada Visi dan Misi yang diemban, maka Kecamatan Silaen mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Silaen Tahun 2025

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2025
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan	100%

2. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Silaen Tahun 2025

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	100%
		Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	100%
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	100%
		Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100%
		Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Silaen, maka disusun program kerja Kecamatan Silaen dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, memperhatikan SOP dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas. Program dan Kegiatan Kecamatan Silaen tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan.

Tabel 2.6 (TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capai an Kinerja	Kebutu han Dana/P agu Indikat if	Sum ber Dana	Target Capaia n Kinerj a
7 0 0 1	2	3	4	5	6	7	8
7 0 0 2	0	0	100 Persen	2.469.424.6 02	100 Persen	100 Persen	2.740.714.8 7
7 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Cakupan kinerja penunjan g urusian pemerintah daerah	Kec. Silaen	100 Persen			
7 0 1 2	0	0	100 Persen	25.000.000	100 Persen	100 Persen	11.123.779
7 0 1 3	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
7 0 1 4	1	0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Silaen	2 Dokumen	DTU - DBH	2 Dokume n
7 0 1 5	1	0	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		12.500.000		4.262.210
7 0 1 6	1	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Silaen	5 Laporan	DTU - DBH	5 Laporan
7 0 1 7	1	0	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah		12.500.000		6.861.569
7 0 2 1	0	0	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 Persen	1.918.249.00 0	100 Persen	2.246.444.750
7 0 2 2	0	0					

Tabel 2.6 (TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026)

7 0 0 2 0 0	1 1 2 1 0 2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Silaen	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	DT U-DBH	2.246.444.750
7 0 0 2 0 0	1 1 2 1 0 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen	146.055.602	100 Persen	100 Persen	106.729.909
7 0 0 2 0 0	1 1 2 1 0 2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Silaen	2 Paket	45.555.602	DT U-DBH	26.605.251
7 0 0 2 0 0	1 1 2 1 0 2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec. Silaen	2 paket	13.000.000	DT U-DBH	2 paket
7 0 0 2 0 0	1 1 2 1 0 2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan yang Disediakan	Kec. Silaen	8 Dokumen	7.500.000	DT U-DBH	8 Dokumen
7 0 0 2 0 0	1 1 2 1 0 2	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Silaen	3 Laporan	80.000.000	DTU - DBH	3 Laporan
								58.521.483

Tabel 2.6 (TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026)

7	0	0	2	.0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	Kec. Silaen	100 Persen	90.000.000	75 Persen	67.622.098
7	1	1	6	6	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Silaen	6 Unit	35.000.000	DTU - DBH	6 Unit	26.311.049
7	0	0	2	.0	0	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Silaen	6 Unit	55.000.000	DTU - DBH	6 Unit	41.311.049
7	1	1	7	0	7	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Kec. Silaen			DTU - DBH	1 Unit	166.807.883
7	0	0	2	.0	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Silaen	100 Persen	176.320.000			
7	1	1	7	1	5	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Silaen	3 Laporan	16.000.000	DTU - DBH	3 Laporan	18.046.213
7	0	0	2	.0	0	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kec. Silaen	2 Laporan	160.320.000	DTU - DBH	2 Laporan	148.761.670

Tabel 2.6 (TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026)

Barang Milik Daerah Yang Terpelihara							Kec Silae n	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	141.986.468	
7	0	0	2	.0	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah							
7	0	1	1	7	0	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7	0	0	2	.0	8	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatannya yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Silae n	4 Unit	65.300.000	DT U - DB H	4 Unit	65.000.000
7	0	0	2	.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Silae n	13 Unit	6.500.000	DT U - DB H	13 Unit	10.000.0000
7	0	1	1	8	2	Pemeliharaan Reabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Silae n	2 Unit	42.000.000	DT U - DB H	2 Unit	66.996.468

Tabel 2.6 (TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026)

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan		Kec. Silaen	100 Persen	301.824.398	100 Persen	271.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan		Kec. Silaen	7 Kegiatan	181.824.398	7 Kegiatan	150.000.000
7 0 0 2 0 9 1 1	0 2 0 9 0 6	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Silaen Laporan	7	181.824.398	DTU - DBH	8	150.000.000
7 0 0 2 0 9 1 2	0 2 0 9 0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Kec. Silaen Laporan	12	120.000.000	2 Unit	121.000.000	
7 0 0 2 0 9 1 2	0 2 0 9 0 2	di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Silaen laporan	120.000.000	12 laporan	121.000.000	

Tabel 2.6 (TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026)

7 0 0 2 0 1	2 0 1	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Kec. Silae n	100 Persen	90.000.000	100 Persen	77.000.000
7 0 1 2	0 2 0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan PemberdayaanDesa/Kelurahan yang Dilakukan	Kec. Silae n	2 Kegiatan	90.000.000	8 Lembaga Kemasyarakatan	77.000.000
7 0 1 2	0 2 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Silae n	1 kegiatan	30.000.000	DTU - DBH	8 Lembaga Kemasyarakatan
7 0 1 2	0 2 0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Silae n	23 Laporan	60.000.000	DTU - DBH	23 Laporan

Tabel 2.6 (TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026)

				Program Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum		Kec. Silae n		100 Persen		100 Persen	
7	0	0	3	7	1	0	2	01	7	0	0	2	01
1				Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	Kec. Silae n	Kec. Silae n	Kec. Silae n	Kec. Silae n	Kegiatan	1	19.819.276	
				7	0	0	2	01	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.000.000	DTU - DBH
				1	1	3	1	1	1	Dokumen	1	19.819.276	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Person desa tertibadminist rasi Pemerintahan desa	Kec. Silae n	Kec. Silae n	Kec. Silae n	Kec. Silae n	100 Persen	100 Persen	7.509.208	
				7	0	0	2	01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Desa yang Dilakukan Fasilitasi	120.000.000	23 Desa
				1	1	5	5	8	8	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	120.000.000	DTU - DBH	23 Laporan
											3.011.249.000		3.011.249.000
T O T A L													

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Silaen, maka disusun program kerja Kecamatan Silaen dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, memperhatikan SOP dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas.

Program dan Kegiatan Kecamatan Silaen tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - o Sub kegiatan Koordinasi sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
- b) Mengadakan Rembuk Stunting di Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 - o Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan
- b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - o Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - o Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 - o Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - o Koordinasi Pendampingan Penurunan dan Pencegahan Stunting di desa.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - o Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - o Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - o Penyediaan peralatan rumah tangga
 - o Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - o Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - o Fasilitas kunjungan tamu
 - o Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - o Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - o Pengadaan mebel
 - o Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - o Penyediaan jasa surat menyurat
 - o Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - o Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- o Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - o Pemeliharaan Mebel
 - o Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - o Pemeliharan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Rencana Pendanaan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

4.2 Pendanaan Kecamatan Silaen

Untuk pendanaan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Silaen pada tahun 2025 adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DTU -DBH) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba.

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Silaen Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Silaen, Juli 2024

